

RENCANA STRATEGIS

DEPARTEMEN POLITIK, PEMERINTAHAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL (P P H I)

Tahun 2021 - 2025

MANUAL MUTU DEPARTEMEN PPHI TAHUN 2021 – 2025

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ratnaningsih Damayanti, S.IP, M.Ec. Dev.	Ketua UJM		31 Agustus 2022
2. Pemeriksaan	Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M.DevSt.	Ketua Departemen PPHI		31 Agustus 2022
3. Persetujuan	Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M.DevSt.	Ketua Departemen PPHI		31 Agustus 2022
4. Penetapan	Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M.DevSt.	Ketua Departemen PPHI		31 Agustus 2022
5. Pengendalian	Johan Wahyudi, S.IP, M.A	Sekretaris Departemen PPHI		31 Agustus 2022

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan 1

Daftar Isi 2

BAB I: PENDAHULUAN 3

1.1. Identifikasi Kondisi Umum..... 3

1.2. Potensi dan Analisis Permasalahan..... 6

1.3. Tantangan..... 7

BAB II: VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 9

2.1. Visi DEPARTEMEN PPHI 9

2.2. Misi DEPARTEMEN PPHI..... 9

2.3. Tujuan DEPARTEMEN PPHI..... 9

2.4. Sasaran Strategis DEPARTEMEN PPHI..... 10

BAB III: ARAH KEBIJAKAN DAN KERANGKA KELEMBAGAAN..... 12

3.1. Arah Kebijakan 12

3.2. Kelembagaan 14

BAB IV: TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... 15

4.1. Target Kinerja 15

4.2. Kerangka Pendanaan..... 29

BAB V: PENUTUP 30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Identifikasi Kondisi Umum

Perguruan tinggi merupakan komponen penting dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian dari perguruan tinggi, DEPARTEMEN PPHI memegang peran dalam mengemban amanah pendidikan nasional dengan menghasilkan lulusan dan produk iptek yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional. DEPARTEMEN PPHI merupakan salah satu DEPARTEMEN yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang menaungi tiga program studi di dalamnya. Ketiga program studi tersebut antara lain Program Studi Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, dan Program Studi Hubungan Internasional.

DEPARTEMEN PPHI dikelola oleh Ketua DEPARTEMEN yang dibantu oleh Sekretaris DEPARTEMEN dan Tim Unit Jaminan Mutu (UJM), serta termasuk di dalamnya terdapat pimpinan-pimpinan program studi yang dilengkapi dengan dosen-dosen program studi, bagian administrasi akademik tenaga kependidikan (tendik) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Laboratorium. UPT meliputi Tim Kurikulum, Tim Monitoring dan Evaluasi Tugas Akhir, Kelompok Jabatan Fungsional Dosen (KJFD), Pengelola Jurnaldan Website; serta Laboratorium.

Tabel 1. Dosen DEPARTEMEN PPHI Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Jumlah		
	PS Ilmu Politik	PS Ilmu Pemerintahan	PS Hubungan Internasional
Doktor	7	4	1
Master	14	14	23
Total	**21**	**18**	**24**

Sumber: Renstra 2021-2025 masing-masing program studi

Berikut adalah profil program studi yang menjadi bagian dalam DEPARTEMEN PPHI, antara lain:

1.1.1. Program Studi Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Politik (PS Ilmu Politik) adalah salah satu program studi yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB). Berdirinya PS Ilmu Politik ini berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan

Nasional RI Nomor: SK Dirjen Dikti nomor 141/DT/2009. Berdasarkan SK tersebut PS Ilmu Politik FISIP UB beroperasi sejak tahun akademik 2009/2010.

PS Ilmu Politik dikelola oleh Ketua Program Studi yang dibantu oleh Koordinator PS Ilmu Politik, yang disebut sebagai pimpinan unit kerja. Ketua dan Koordinator PS Ilmu Politik ini dilengkapi dengan bagian administrasi akademik tenaga kependidikan (tendik) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Laboratorium. UPT meliputi Tim Kurikulum, Tim Monitoring dan Evaluasi Tugas Akhir, Kelompok Jabatan Fungsional Dosen (KJFD), Pengelola Jurnal JPPOL dan Website; serta Laboratorium meliputi Laboratorium Politik dan Rekayasa Kebijakan (LaPoRa).

PS Ilmu Politik FISIP UB yang baru berdiri hampir satu setengah dekade ini, dikelola dengan mendapat dukungan dari pihak internal maupun eksternal. Dukungan ini berasal dari segenap dosen, pejabat dan tendik di PS Ilmu Politik serta semua elemen di level fakultas dan universitas.

Sementara dukungan eksternal berasal dari lembaga pemerintah di luar kampus, lembaga non pemerintah serta segenap *stakeholder* di bidang pendidikan yang relevan dalam ilmu politik. PS Ilmu Politik telah menghasilkan lulusan yang diterima lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga kepemiluan dan partai politik, di perusahaan swasta, perbankan dan organisasi lain yang relevan, serta oleh perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri baik sebagai dosen maupun untuk studi lanjut di tingkat Strata 2 dan 3.

PS Ilmu Politik juga semakin dipercaya oleh pemangku kepentingan, hal ini bisa dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah mahasiswa yang berminat masuk ke PS Ilmu Politik setiap tahun. Kepercayaan pihak eksternal juga bisa dilihat dari makin meningkatnya kerja sama dalam berbagai bidang: dalam rangka penelitian, pemagangan mahasiswa, serta kegiatan akademik lain dalam bentuk seminar serta studi banding.

1.1.2. Program Studi Ilmu Pemerintahan

FISIP UB mendapatkan ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan adanya SK DIKTI No. 1621/D/T/2007 tertanggal 6 Juli 2007. Pada tahun 2009, Program Studi Ilmu Pemerintahan memperoleh ijin perpanjangan

penyelenggaraan dengan diterbitkannya SK Dikti Nomor: 2849/D/T/K-N/2009 tertanggal 15 Juli 2009.

Dengan mendasarkan ijin penyelenggaraan dari DIKTI, PS Ilmu Pemerintahan FISIP UB melakukan berbagai upaya dalam rangka menjadikan PS Ilmu Pemerintahan FISIP UB menjadi salah satu program studi Ilmu Pemerintahan yang mampu berkompetisi baik dilingkup nasional maupun internasional. Berbagai upaya penguatan kelembagaan seperti rekruitmen staf pengajar yang kompeten, rekruitmen mahasiswa yang selektif serta penyiapan kurikulum Ilmu Pemerintahan serta penyediaan sarana prasarana yang mendukung pengembangan PS Ilmu Pemerintahan FISIP UB.

Proses perbaikan kualitas dan mutu pendidikan pada akhirnya tercermin dari hasil akreditasi dari BAN-PT yang mengalami perbaikan. Pada tahun 2014, PS Ilmu Pemerintahan mendapatkan akreditasi B dari BAN-PT dengan Nomor SK: 280/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 yang berlaku sampai dengan 15-08-2019. Hasil akreditasi tersebut naik menjadi A pada tahun 2019 dengan Nomor SK: 1795/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019, berlaku sampai dengan 28-05-2024. Perbaikan tersebut mempunyai konsekuensi adanya perbaikan signifikan dari pelayanan pendidikan PS Ilmu Pemerintahan FISIP UB. Oleh karena itu, sebagai bagian dari *supporting system*, Renstra ini dibuat dalam rangka untuk memastikan agak terjadi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan secara terukur di PS Ilmu Pemerintahan FISIP UB.

1.1.3. Program Studi Hubungan Internasional

Program Studi Hubungan Internasional (PS HI) sendiri menjadi bagian dari FISIP Universitas Brawijaya sejak tahun 2007. Secara resmi PS HI berdiri melalui penerbitan ijin penyelenggaraan dengan SK DIKTI No. 1621/D/T/2007 tertanggal 6 Juli 2007. Dua tahun kemudian, setelah melalui masa evaluasi, SK ijin penyelenggaraan tersebut diperpanjang melalui SK Dikti Nomor : 2849/D/T/KN/2009. Dengan mendasarkan ijin penyelenggaraan dari DIKTI, PS HI FISIP UB melakukan berbagai upaya dalam rangka menjadikan PS HI FISIP UB menjadi salah satu program studi Hubungan Internasional yang mampu berkompetisi baik dilingkup nasional maupun internasional. Berbagai upaya penguatan

kelembagaan telah dilakukan, seperti: rekruitmen staf pengajar yang kompeten, rekruitmen mahasiswa yang selektif, penyiapan kurikulum, hingga penyediaan sarana prasarana yang mendukung pengembangan PS HI FISIP UB.

Sebagai bagian dari lembaga pendidikan tinggi, Program Studi Hubungan Internasional FISIP UB memiliki komitmen menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang meliputi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka berpartisipasi di dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanahkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

1.2. Potensi dan Analisis Permasalahan

Identifikasi permasalahan-permasalahan DEPARTEMEN PPHI, sebagai berikut:
(1) Aspek Tata Pamong (Pengelolaan DEPARTEMEN); (2) Proses transisi tiga program studi (Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Hubungan Internasional) menjadi masing- masing DEPARTEMEN; (3) Aspek Sumber Daya Manusia: (DTPS, Tendik); (4) Pembukaan program magister; (5) Aspek Kerjasama; (6) Prestasi Mahasiswa; (7) Lulusan yang dihasilkan.

Tabel 2. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman DEPARTEMEN PPHI

Strength	***Weakness***	***Opportunity***	***Threat***
1. Sarana dan Prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran. 2. Jejaring dosen di dalam dan di luar kampus. 3. Beberapa dosen telah memiliki reputasi akademik baik di tingkat nasional maupun internasional. 4. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan tri dharma dosen. 5. Prestasi mahasiswa	1. Belum memiliki guru besar 2. Jabatan fungsional dosen mayoritas Asisten Ahli dan Tenaga Pengajar 3. Status akreditasi masing-masing program studi 4. Percepatan doktor dengan jabatan lector 5. Percepatan jabatan fungsional dosen dan Guru besar	1. Peluang mendirikan program magister Ilmu Pemerintahan dan magister Ilmu Politik 2. Besarnya jumlah mahasiswa yang dimiliki oleh DEPARTEMEN 3. Jumlah dosen yang cukup besar yang terdapat di DEPARTEMEN	1. Banyak DEPARTEMEN serupa dari perguruan tinggi lain yang memiliki reputasi internasional 2. Lulusan yang dihasilkan dari DEPARTEMEN serupa dari perguruan tinggi lain meningkatkan kompetisi di dunia kerja 3. Tantangan Ketersedian beasiswa yang kecil dan terbatas

1.3. Tantangan

Setidaknya, dapat diidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh DEPARTEMEN PPHI saat ini dan potensial untuk masa mendatang:

a. Tantangan penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); Mendorong kolaborasi yang nyata antara dunia pendidikan, dunia usaha dan komponen bangsa lainnya diyakini dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembentukan pengetahuan dan skill bagi peserta didik, terlebih lagi memberikan dampak positif bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
b. Tantangan rencana program studi menjadi masing-masing DEPARTEMEN; *Resources*tenaga pengajar, mahasiswa, sarana dan prasarana, serta pengembangan keilmuan menjadi tuntutan bagi program studi yang tergabung dalam DEPARTEMEN PPHI untuk berkembang menjadi DEPARTEMEN sendiri. Program Studi Ilmu Pemerintahan dinilai memenuhi penilaian untuk dapat didorong menjadi suatu DEPARTEMEN yang mandiri. Sementara itu, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dari ketersediaan tenaga pengajar (dosen) belum mampu untuk dapat diusulkan menjadi satu DEPARTEMEN. Dengan demikian pilihan yang lebih strategis adalah menggabungkan kepada Program Studi Ilmu Politik yang telah mumpuni untuk menjadi suatu DEPARTEMEN tersendiri.
c. Tantangan pembukaan program magister; Seperti yang disinggung bahwa sumber daya tenaga pengajar yang terdapat di DEPARTEMEN PPHI sangat mencukupi khususnyabagi Program Studi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan untuk memulai mengusulkan proposal pendirian Program Master (S2) untuk kedua disiplin ilmu tersebut.
d. Tantangan lulusan yang dihasilkan; Masa tunggu kerja dan kemampuan lulusan menjadi wiraswasta merupakan poin yang menjadi perhatian DEPARTEMEN untuk mampu berkontribusi guna penciptaan percepatan kerja dan pengembanga kemampuan berwirausaha lulusan.
e. Tantangan menuju DEPARTEMEN bereputasi internasional; Modal ini telah dimiliki oleh DEPARTEMEN PPHI dengan banyaknya para pengajar yang memiliki reputasi karya ilmiah yang mampu menembus jurnal dengan reputasi internasional. Mengarahkan fokus pengembangan dan penajaman atas

kemampuan ini menjadi langkah utama yang harus dilakukan.

BAB II
VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi DEPARTEMEN PPHI

"Menjadi DEPARTEMEN Bereputasi Internasional Dalam Kajian Politik, Pemerintahan, Dan Hubungan Internasional Yang Berperan Aktif Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Mewujudkan Masyarakat Adil Dan Sejahtera"

2.2. Misi DEPARTEMEN PPHI

1. Mengelola Pendidikan Yang Inovatif, Adaptif dan Integratif Melalui Sumber Daya Program Studi Bereputasi Internasional Yang Ada Dilingkup DEPARTEMEN PPHI Untuk Menghasilkan Lulusan Berkualitas.
2. Mengelola Penelitian dan Publikasi Yang Bereputasi Nasional dan Internasional Untuk Pengembangan Keilmuan.
3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Kolaboratif Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Masyarakat.
4. Menyelenggarakan Tata Kelola DEPARTEMEN Yang Berorientasi Pengembangan KualitasSDM Dan Budaya Mutu.

2.3. Tujuan DEPARTEMEN PPHI

Tujuan 1:

Memfasilitasi Program Studi Agar Memiliki Reputasi Internasional Sehingga Menghasilkan Lulusan Yang Kompetitif Dan Kompeten.

Tujuan 2:

Menghasilkan Karya Ilmiah Untuk Mengembangkan Ilmu Pengetahuan.

Tujuan 3:

Menghasilkan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Berdaya Guna.

Tujuan 4:

Mewujudkan Sistem Tata Kelola DEPARTEMEN Yang Efektif Dan Efisien Dengan DidukungSumberdaya Manusia Yang Berkualitas.

2.4. Sasaran Strategis DEPARTEMEN PPHI

Misi 1:

Mengelola Pendidikan Yang Inovatif, Adaptif Dan Integratif Melalui Sumber daya Program Studi Bereputasi Internasional Yang Ada Dilingkup DEPARTEMEN PPHIUntuk Menghasilkan Lulusan Berkualitas.

Tujuan 1:

Menghasilkan Sistem Pembelajaran Yang Memfasilitasi Program Studi Untuk Mencetak Lulusan Yang Kompetitif Dan Kompeten.

Sasaran 1:

1. Terwujudnya DEPARTEMEN yang memiliki program studi yang bersaing secaranasional dan internasional
2. Memiliki mekanisme pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar lintas disiplin guna mendukung program kampus merdeka
3. Terwujudnya Mahasiswa yang kompeten dan berdaya saing
4. Terwujudnya alumni yang kompeten dan berdaya saing

Misi 2:

Mengelola Penelitian Dan Publikasi Yang Bereputasi Nasional Dan Internasional Untuk Pengembangan Keilmuan.

Tujuan 2:

Menghasilkan Karya Ilmiah Untuk Mengembangkan Ilmu Pengetahuan.

Sasaran 2:

1. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi nasional dan internasional untuk pengembangan kajian politik, pemerintahan dan hubungan internasional

2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian untuk kebutuhan pemangku kepentingan, terutama masyarakat

3. Meningkatnya kerjasama penelitian dan publikasi ilmiah dengan pihak internal dan eksternal

Misi 3:

Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Kolaboratif Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Masyarakat.

Tujuan 3:

Menghasilkan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Berdaya Guna.

Sasaran 3:

1. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang berbasis pada hasil penelitian dan kajian kelompok keahlian
2. Meningkatnya kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan pihak internal dan eksternal

Misi 4:

Menyelenggarakan Tata Kelola DEPARTEMEN Yang Berorientasi PengembanganKualitas SDM Dan Budaya Mutu.

Tujuan 4:

Mewujudkan Sistem Tata Kelola DEPARTEMEN Yang Efektif Dan Efisien DenganDidukung SDM Yang Berkualitas.

Sasaran 4:

1. Terwujudnya kompetensi SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
2. Tersedianya infrastruktur, sarana, dan prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian yang mampu mendukung tata kelola DEPARTEMEN.
3. Terwujudnya sistem tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel dan efisien.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan

3.1.1. Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada tingkat pendidikan tinggi adalah Kebijakan "Kampus Merdeka". Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu: (1) pembukaan program studi baru; (2) sistem akreditasi perguruan tinggi; (3) perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi. Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi dan mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih DEPARTEMEN studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembanan kapasitas dirinya.

Dalam konteks perwujudan kemandirian, pelaksanaan konsep "Kampus Merdeka", tantangan perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam pencapaian visi RPJMN 2020- 2024 adalah: (1)menemukan dan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kreativitas masyarakat; (2)meningkatkan kualitas dan ketersediaan atau akses terhadap pelayanan dasar; (3)meningkatkan komersialisasi inovasi lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan Dunia Industri; (4)memanfaatkan teknologi digital dalam segala aspek untuk mengantisipasi Revolusi Industri 4.0; (5)mengoptimalkan skema pembiayaan inovatif seperti KPBU dan skema pembiayaan proyek infrastruktur tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penggalangan sumber pembiayaan alternatif (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah/PINA); (6) memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).

3.1.2. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

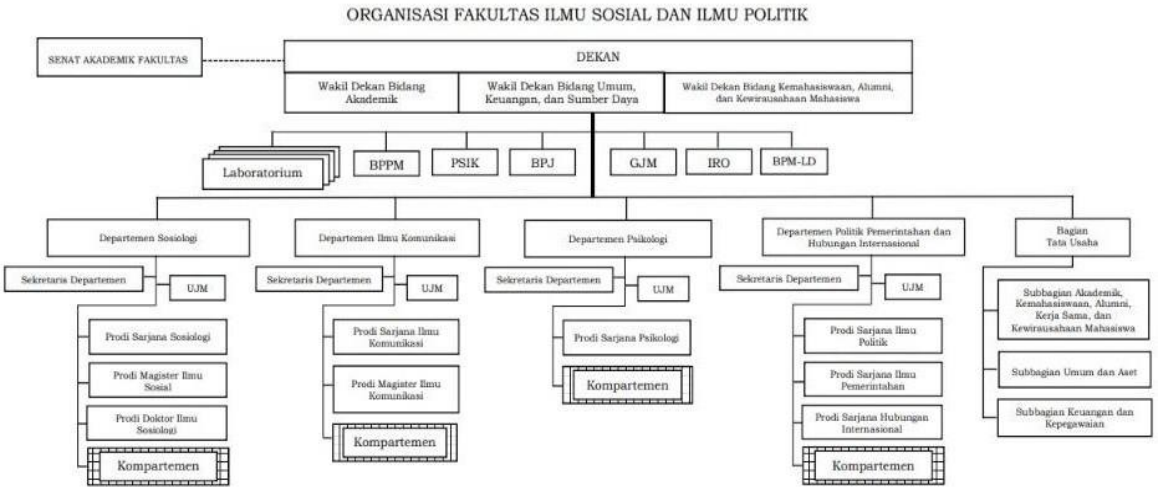
Rencana peralihan Universitas Brawijaya menjadi PTN-BH turut dijelaskan dalam Renstra UB 2020-2024, utamanya mengakomodasi tahapan I pengembangan jangka Panjang UB 2034-2039. Berkaitan dengan peralihan PTN-BLU menjadi PTN-BH, hal-hal sebagai berikut ini harus diakomodasi dalam masa transisi Universitas Brawijaya menuju PTN-BH, sebagai berikut:

1) Perbaikan tata kelola UB berkaitan dengan struktur organisasi dan uraian tugas dengan penjabaran organisasi, hubungan, dan kewenangan yang mendasarkan pada aspek produktivitas dan efisiensi. Beberapa unit kerja yang tidak diperlukan harus dirasionalisasikan; 2) Sistem pengelolaan keuangan harus dapat mengakomodasi inovasi kegiatankegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan termasuk pengelolaan manajemen keuangannya. Sistem informasi harus mampu mendeteksi dan mengelola dengan prinsip pengendalian internal yang kuat dan akuntabel; 3) Perlu adanya peningkatan konsistensi implementasi regulasi yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kepastian regulasi dan keadilan. Upaya ini dapat diantisipasi dengan penegakan sistem reward dan punishment yang lebih tegas; 4) Perlu adanya pemetaan SDM untuk mengidentifikasi kebutuhan dan penilaian produktivitasnya; 5) Sistem pengukuran kinerja harus dapat dituntaskan pada masa peralihan dengan mengaitkan antara ukuran kinerja UB, ukuran kinerja unit kerja, dan ukuran kinerja individu. Mekanisme kontrak kinerja harus diimplementasikan secara terstruktur dengan penyelenggaraan sistem informasi yang efektif dan dapat dikaitkan dengan sistem remunerasi; 6) Permasalahan hak milik dan hak pengelolaan aset harus dapat diselesaikan untuk dapat menjamin status kepemilikan yang legal sesuai ketentuan; 7) Mekanisme pengelolaan badan usaha, model investasi UB terhadap Badan Usaha, hubungan badan usaha dengan UB, alokasi pagu anggaran berdasarkan pendapatan yang diperoleh, konsolidasi pelaporan keuangan, dan pengukuran kinerja dapat dituntaskan sehingga kontribusi badan usaha dapat terukur secara spesifik.

3.2. Kelembagaan

DEPARTEMEN PPHI FISIP UB adalah unit organisasi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB). Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Brawijaya, struktur organisasi yang ada di FISIP adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1. Struktur Organisasi FISIP UB



Ketua DEPARTEMEN PPHI adalah pimpinan dari DEPARTEMEN PPHI FISIP UB yang melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris DEPARTEMEN PPHI. Ketua dan Sekretaris DEPARTEMEN PPHI bertanggung jawab menaungi dan memfasilitasi koordinasi kepada pimpinan program studi yang menjadi bagian DEPARTEMEN Politik, Pemerintahan dan Hubungan Internasional (PPHI). Ketua DEPARTEMEN PPHI diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Fakultas. Ketua DEPARTEMEN PPHI bertanggung jawab kepada Dekan dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan. Ketua DEPARTEMEN PPHI memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi internal dengan Sekretaris DEPARTEMEN, Tim Unit Jaminan Mutu, serta semua Program Studi yang menjadi bagian DEPARTEMEN PPHI yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan mutu pendidikan yang baik.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja yang tersusun di bawah ini mengacu pada matriks rencana strategis (Renstra) yang sudah disusun oleh FISIP sebelumnya. Pada matriks Renstra yang disusun FISIP untuk tahun 2021 – 2025, Sasaran Strategis tersebut diturunkan secara mendetail dalam program-program yang lebih spesifik, setelah itu menetapkan kegiatan-kegiatan mendetail untuk mencapai tujuan Renstra lima tahun mendatang.

Masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan, menyertakan indikator terukur yang menjadi bahan acuan, sekaligus sebagai tolok ukur yang bisa dievaluasi keberhasilan atau kegagalan Renstra dalam mencapai target yang ditetapkan. Indikator tersebut secara berurutan disusun sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS),
b. Indikator Program (IP), dan
c. Indikator Kegiatan (IK).

Pada bagian indikator kegiatan (IK), secara mendetail dicantumkan jumlah (kuantitas/prosentase) capaian kegiatan di masing-masing tahun berjalan. Indikator kegiatan inilah yang kemudian menjadi acuan utama Jurusan PPHI dalam menyusun target capaian hingga lima tahun mendatang.

Diantara variabel yang ada dalam Sasaran Strategis yang telah ditetapkan FISIP, tidak semua variabel diadopsi oleh Jurusan PPHI, sebab sebagian diantaranya bukan menjadi tugas pokok fungsi Jurusan PPHI, misalnya: tata kelola layanan fakultas, pengelolaan laboratorium, pembuatan kerja sama, dan lainnya. Sasaran Strategis tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN 1:

SASARAN STRATEGIS (SS) 1.1	
Terwujudnya Jurusan yang Memiliki Program Studi yang Bersaing Secara Nasional dan Internasional	
Indikator SS	**Indikator Program**
1.1. Reputasi/Internasionalisasi Program Studi	1.1.1. Peningkatan jumlah mahasiswa outbound/inbound 1.1.2. Peningkatan Jumlah Dosen outbound/inbound
1.2. Akreditasi Program Studi	1.2.1. Peningkatan Akreditasi Program Studi
1.3. Tersedianya dosen-dosen Program Studi yang memiliki reputasi keilmuan dalam skala Nasional/Internasional	1.3.1. Peningkatan jumlah karya ilmiah dosen di jurnal terindeks internasional

Indikator Kegiatan

No	Indikator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
1.1.1.1	Jumlah Program outbound/inbound mahasiswa dan dosen dari universitas di Asia Tenggara	10	15	24	35
1.1.2.1	Jumlah visiting lecture dan professor	3	3	4	10
1.2.1.1	Jumlah Program studi terakreditasi A/Unggul BAN PT	3	3	3	3
1.3.1.1	Jumlah Pelatihan penulisan karya ilmiah bereputasi internasional	15	15	15	20
1.3.1.2	Jumlah keterlibatan dosen mengikuti seminar /konferensi internasional	30	40	58	58

SASARAN STRATEGIS (SS) 1.2	
Memiliki Mekanisme Pembelajaran yang Memungkinkan Mahasiswa untuk Belajar Lintas Disiplin Guna Mendukung Program Kampus Merdeka	
Indikator SS	**Indikator Program**
2.1. Tersedianya program studi yang menerapkan pembelajaran lintas disiplin	2.1.1. Peningkatan kerja sama antar program studi 2.1.2. Peningkatan persentase program studi yang menerapkan pembelajaran lintas disiplin
2.2. Terwujudnya mekanisme pembelajaran yang sesuai dengan tujuan program kampus merdeka	2.2.1. Pengembangan Teknik Pembelajaran mutakhir 2.2.2. Peningkatan kurikulum berbasis program kampus merdeka

Indikator Kegiatan

No	Indikator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
2.1.1.1	Jumlah kerja sama antara institusi pendidikan maupun non pendidikan	6	6	6	12
2.1.1.2	Jumlah program benchmarking untuk penguatan kurikulum merdeka belajar	3	3	3	5
2.1.2.1	Jumlah mata kuliah berorientasi merdeka belajar	60	60	98	98
2.2.2.1.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	3	3	3	3

SASARAN STRATEGIS (SS) 1.3	
Terwujudnya Mahasiswa yang Kompeten dan Berdaya Saing	
Indikator SS	**Indikator Program**
3.1. Tersedianya lulusan dengan masa studi tepat waktu	3.1.1. Peningkatan jumlah lulusan dengan masa studi tepat waktu 3.1.2. Persentase jumlah mahasiswa tidak tepat waktu berkurang
3.2. Tersedianya Mahasiswa dan lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	3.2.1. Peningkatan pelaksanaan pelatihan yang tersertifikasi oleh lembaga yang kredibel dan kompeten
3.3. Tersedianya mahasiswa dan lulusan yang berwirausaha	3.3.1. Peningkatan jumlah pelatihan kewirausahaan 3.3.2. Peningkatan keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi wirausaha 3.3.3. Persentase bantuan usaha bagi mahasiswa dan alumni berwirausaha melalui kompetisi
3.4. Tersedianya mahasiswa berprestasi tingkat nasional	3.4.1. Peningkatan keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi pada tingkat nasional 3.4.2. Peningkatan persentase bantua kegiatan kompetisi mahasiswa dalam ajang nasional

3.5. Tersedianya mahasiswa berprestasi tingkat internasional	3.5.1. Peningkatan keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi pada tingkat internasional 3.5.2. Peningkatan persentase bantua kegiatan kompetisi mahasiswa dalam ajang nasional

Indikator Kegiatan

No	Indikator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
3.1.1.1	Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu	90	106	100	200
3.2.1.1	Jumlah lulusan bersertifikat	90	106	100	200
3.3.1.1	Jumlah mahasiswa dan lulusan yang berwirausaha	10	21	21	160
3.4.1.1	Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional/Internasional	90	106	122	200

SASARAN STRATEGIS (SS) 1.4	
Terwujudnya Alumni yang Kompeten dan Berdaya Saing	
Indikator SS	**Indikator Program**
4.1. Masa tunggu kerja lulusan	4.1.1. Peningkatan dan penguatan kinerja unit karir dan kewirausahaan

Indikator Kegiatan

No	Indikator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
4.1.1.1	Jumlah pelatihan dan pembinaan karir bagi alumni	1	1	1	2
4.1.1.2	Keberlanjutan *Tracer Study* alumni	1	1	1	2

SASARAN 2:

SASARAN STRATEGIS (SS) 2.1	
Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi nasional dan internasional untuk pengembangan kajian politik, pemerintahan dan hubungan internasional	
Indikator SS	**Program**
(1.1) Meningkatnya jumlah publikasi terindeks minimal Sinta-2	(1.1.1) Peningkatan publikasi karya ilmiah dosen Jurusan PPHI pada jurnal terindeks minimal Sinta-2
(1.2) Terwujudnya jurnal elektronik terakreditasi di Jurusan PPHI	(1.2.1) Pengembangan journal elektronik terakreditasi
	(1.2.2) Penguatan kompetensi sumberdaya pengelola jurnal
(1.3) Terwujudnya kerjasama penelitian kolaborasi dengan institusi internasional	(1.3.1) Penjajakan kerjasama dengan institusi internasional
	(1.3.2) Peningkatan realisasi kerjasama penelitian kolaborasi dengan institusi luar negeri

Indikator Kegiatan

No	Indicator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
1.1.1.1	Kuantitas publikasi dosen PPHI pada jurnal terindeks minimal Sinta-2	20	25	28	29
1.1.2.1	Akreditasi Jurnal Program studi di Jurusan PPHI	1	1	1	1
1.1.2.2	Konsistensi penerbitan jurnal	1	1	1	1
1.1.3.1	Kuantitas publikasi penelitian kolaborasi internasional	2	2	2	2
1.1.3.2	Kuantitas penelitian kolaborasi dengan institusi internasional	2	2	2	2

SASARAN STRATEGIS (SS) 2.2	
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian untuk kebutuhan pemangku kepentingan, terutama masyarakat	
Indikator SS	**Program**
(2.1) Meningkatnya kuantitas penelitian kolaborasi	(2.1.1) Peningkatan peran lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat
	(2.1.2) Peningkatan peran dosen PPHI dalam penelitian aplikatif bersama pemangku kepentingan dan masyarakat
(2.2) Terwujudnya kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan hasil penelitian	(2.2.1) Pengembangan kajian penelitian yang mengarah pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan keilmuan
	(2.2.2) Diseminasi dan implementasi hasil penelitian yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Indikator Kegiatan

No	Indicator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
2.1.1.1	Kuantitas penelitian kolaborasi yang difasilitasi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat	24	30	39	45
2.1.2.1	Prosentase keikutsertaan dosen dalam penelitian kolaborasi	24	30	29	39
2.2.1.1	Kuantitas publikasi penelitian kolaborasi yang sesuai dengan bidang kajian dosen PPHI	24	30	39	60
2.2.2.1	Jumlah sitasi karya ilmiah per Dosen Tetap Jurusan PPHI	12.7	12.7	12.7	12.7

SASARAN STRATEGIS (SS) 2.3	
Meningkatnya kerjasama penelitian dan publikasi ilmiah dengan pihak internal dan eksternal	
Indikator SS	**Program**
(3.1) Meningkatnya kerjasama yang berbasis pengembangan inovasi	(3.1.1) Peningkatan tindak lanjut kerjasama/MoU dengan institusi luar negeri untuk pelaksanaan penelitian kolaboratif
	(3.1.2) Pemantapan dan optimalisasi jejaring yang sudah ada dengan lembaga Internasional dalam bidang riset

Indikator Kegiatan

No	Indicator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
3.1.1.1	Kuantitas kerjasama yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan inovasi di bidang politik, pemerintahan dan hubungan internasional	3	6	9	9

SASARAN 3:

SASARAN STRATEGIS (SS) 3.1	
Terselenggaranya Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berbasis pada Hasil Penelitian dan Kajian Kelompok Keahlian	
Indikator SS	**Indikator Program**
3.1. Peningkatan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat	3.1.1. Peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BPPM) 3.1.2. Peningkatan *output* Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kegiatan

No	Indikator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
3.1.2.1	Jumlah *output* Pengabdian Kepada Masyarakat	30	30	46	50

SASARAN STRATEGIS (SS) 3.2	
Meningkatnya Kerja Sama Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Pihak Internal dan Eksternal	
Indikator SS	**Indikator Program**
3.1. Peningkatan jumlah kerja sama dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.1.1. Peningkatan kinerja badan/unit kerja sama

Indikator Kegiatan

No	Indikator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
3.1.1.	Jumlah MoA/MoU kerja sama Pengabdian kepada masyarakat	30	30	46	50

SASARAN 4:

Sasaran Strategis 4.1	
Terwujudnya kompetensi SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.	
IKSS	**Program**
(4.1) Tersedianya sistem dan prosedur dalam rangka peningkatan jabatan fungsional	(4.1.1) Penyusunan SOP bagi unit kerja terkait dengan peningkatan jabatan fungsional

(4.2) Tersedianya program untuk memfasilitasi studi doktoral dosen	(4.2.1) Peningkatan jumlah dosen bergelar doktor
(4.3) Tersedianya program pelatihan pendidikan PEKERTI dan AA	(4.3.1) Peningkatan Jumlah Dosen yang memeliki sertifikat peatihan PEKERTI dan AA

Indikator Kegiatan

No	Indicator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
4.1.1.1	Jurusan memiliki SOP percepatan jabatan fungsional dosen	1	1	1	1
4.1.1.2	Jumlah Dosen Naik Jabfung ke AA	2	2	2	2
4.1.1.3	Jumlah Dosen Naik Jabfung ke Lektor	15	15	31	36
4.1.1.4	Jumlah Dosen Naik Jabfung ke Lektor Kepala	1	1	2	2
4.1.1.5	Jumlah Dosen Naik Jabfung ke Guru Besar	1	1	1	2
4.1.1.5	Pendampingan bagi PPHI dalam mendapatkan LoA studi doctoral	1	1	1	2
4.2.1.1	Jumlah dosen bergelar doktor	10	15	15	18
4.3.1.1	Jumlah Dosen Ikut Pekerti dan AA	5	6	6	18

Sasaran Strategis 4.2	
MEWUJUDKAN SISTEM PENATAKELOLAAN JURUSAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN DIDUKUNG SDM YANG BERKUALITAS	
IKSS	**Program**
(4.1) Tersedianya infrastruktur, sarana, dan prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian yang mampu mendukung tata kelola jurusan	(4.1.1) Pemeliharaan infrastruktur, sarana, dan prasarana pendidikan secara reguler; (4.1.2) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh dosen (4.1.3) Peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian dosen (4.1.4) Peningkatan kapasitas dosen pada bidang penelitian dan pengabdian

Indikator Kegiatan

No	Indicator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
4.1.1.1	Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan jurusan	2	2	2	2
4.1.1.2	Tersedianya perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dosen untuk menunjang aktivitas pendidikan	1	1	1	1
4.1.1.3	Penyelenggaraan hibah dan/atau kompetisi penelitian dan pengabdian untuk dosen secara reguler	1	1	1	1
4.1.1.4	Pelatihan menulis dan metodologi bagi dosen	1	1	1	1

Sasaran Strategis 4.3	
Terwujudnya sistem tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel dan efisien.	
IKSS	**Program**
(4.3) Tersedianya rencana induk pengembangan institusi yang menjadi acuan pengelolaan	(4.3.1) Peningkatan kinerja perencanaan & pengendalian pengelolaan institusi
(4.3) Indeks Kepuasan Masyarakat	(4.3.2) Peningkatan daya ungkit (leverage) organisasi dan efisiensi kelembagaan jurusan PPHI UB
(4.3) Tersedianya basis data program studi untuk menunjang kegiatan civitas akademika yang terintegrasi	(4.3.3) Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan data untuk kebutuhan pengembangan sistem informasi terpadu

Indikator Kegiatan

No	Indicator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
4.3.1.1	Nilai LAKIN	97.5	97.5	97.5	97.5
4.3.1.2	Penguatan sistem integrasi perencanaan, pelaksanaan dan monev pengelolaan perguruan tinggi (SAKIP)	58	58	58	58
4.3.1.3	Nilai monitoring & evaluasi pengelolaan pendidikan tinggi	1	1	1	1
4.3.2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	1	1	1	3
4.3.3.1	Ketersediaan Basis Data Terpadu mengenai profil setiap prodi dan data pendukung lainnya yang aksesibel	1	1	1	1
4.3.3.2	Ketersediaan profil bidang keahlian dosen PPHI yang diunggah pada website PPHI	3	3	3	3

Indikator Kinerja Program Studi Ilmu Politik

No	SS	Indikator Kinerja			Satuan	Sumber Data & Daduk	Target S1 Pol
1	**Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi**	**2. Mahasiswa mendapat Pengalaman di Luar Program Studi**					
		1	1	Mahasiswa aktif PS S1 melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar program studi (MBKM) baik di luar/dalam UB sebanyak 10-20sks/semester * Poin nilai sejumlah SKS yang diambil **Bukan MK wajib PT	Nilai	PDDIKTI & ST MBKM, KHS	131
			9 Program MBKM	Magang/praktik kerja			
				Asisten mengajar di satuan pendidikan			
				Penelitian di Lembaga riset/pusat studi			
				Proyek Kemanusiaan			
				Kewirausahaan			
				Proyek/Studi Independen			
				Membangun Desa/KKN Tematik			
				Pertukaran Pelajar			
				Bela Negara			
		2		Mahasiswa aktif PS S1 Inbound dalam program pertukaran pelajar dari luar UB (eksternal) sebanyak 10-20sks/semester *Poin nilai sejumlah SKS yang diambil **Bukan MK wajib PT ***Re-NIM UB	Nilai	PDDIKTI & SK UB, KHS	131
3	**Meningkatnya kualitas kurikulum dan Pembelajaran**	**6. Kemitraan Program Studi**					
		1	1	Kemitraan PS S1 : PT LN QS 200 / PT DN QS 200 (UI / UGM)	Nilai	SIKERMA & PKS, Laporan implementasi	**1.5**
		7. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif					54
		1		Mata Kuliah PS S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	MK	PDDIKTI & RPS, Portofolio	**33**
		8. Program Studi Berstandar Internasional					
		3		Program studi terakreditasi A atau Unggul	Prodi	Manual & Sertifikat	**1**
		4	1	Mahasiswa lulus tepat waktu PS S1	Persen		**50**

Indikator Kinerja Program Studi Ilmu Pemerintahan

No	SS	Indikator Kinerja			Satuan	Sumber Data & Daduk	Target S1 Pem
1	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	**2. Mahasiswa mendapat Pengalaman di Luar Program Studi**					
		1	1	Mahasiswa aktif PS S1 melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar program studi (MBKM) baik di luar/dalam UB sebanyak 10-20sks/semester * Poin nilai sejumlah SKS yang diambil **Bukan MK wajib PT	Nilai	PDDIKTI & ST MBKM, KHS	133
			9 Program MBKM	Magang/praktik kerja			
				Asisten mengajar di satuan pendidikan			
				Penelitian di Lembaga riset/pusat studi			
				Proyek Kemanusiaan			
				Kewirausahaan			
				Proyek/Studi Independen			
				Membangun Desa/KKN Tematik			
				Pertukaran Pelajar			
				Bela Negara			
		2		Mahasiswa aktif PS S1 Inbound dalam program pertukaran pelajar dari luar UB (eksternal) sebanyak 10-20sks/semester *Poin nilai sejumlah SKS yang diambil **Bukan MK wajib PT ***Re-NIM UB	Nilai	PDDIKTI & SK UB, KHS	133
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan Pembelajaran	**6. Kemitraan Program Studi**					
		1	1	Kemitraan PS S1 : PT LN QS 200 / PT DN QS 200 (UI / UGM)	Nilai	SIKERMA & PKS, Laporan implementasi	**1.5**
		7. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif					50
		1		Mata Kuliah PS S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	MK	PDDIKTI & RPS, Portofolio	**31**
		8. Program Studi Berstandar Internasional					
		3		Program studi terakreditasi A atau Unggul	Prodi	Manual & Sertifikat	**1**
		4	1	Mahasiswa lulus tepat waktu PS S1	Persen		**50**

Indikator Kinerja Program Studi Hubungan Internasional

No	SS	Indikator Kinerja			Satuan	Sumber Data & Daduk	Target S1 HI
1	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	**2. Mahasiswa mendapat Pengalaman di Luar Program Studi**					
		1	1	Mahasiswa aktif PS S1 melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar program studi (MBKM) baik di luar/dalam UB sebanyak 10-20sks/semester * Poin nilai sejumlah SKS yang diambil **Bukan MK wajib PT	Nilai	PDDIKTI & ST MBKM, KHS	176
			9 Program MBKM	Magang/praktik kerja			
				Asisten mengajar di satuan pendidikan			
				Penelitian di Lembaga riset/pusat studi			
				Proyek Kemanusiaan			
				Kewirausahaan			
				Proyek/Studi Independen			
				Membangun Desa/KKN Tematik			
				Pertukaran Pelajar			
				Bela Negara			
		2		Mahasiswa aktif PS S1 Inbound dalam program pertukaran pelajar dari luar UB (eksternal) sebanyak 10-20sks/semester *Poin nilai sejumlah SKS yang diambil **Bukan MK wajib PT ***Re-NIM UB	Nilai	PDDIKTI & SK UB, KHS	176
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan Pembelajaran	**6. Kemitraan Program Studi**					
		1	1	Kemitraan PS S1 : PT LN QS 200 / PT DN QS 200 (UI)	Nilai	SIKERMA & PKS, Laporan implementasi	**1.5**
		7. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif					61
		1		Mata Kuliah PS S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	MK	PDDIKTI & RPS, Portofolio	**37**
		8. Program Studi Berstandar Internasional					
		3		Program studi terakreditasi A atau Unggul	Prodi	Manual & Sertifikat	**1**
		4	1	Mahasiswa lulus tepat waktu PS S1	Persen		**50**

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan diturunkan berdasarkan kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB Tahun 2021-2025, yaitu sebagai berikut:

KERANGKA PENDANAAN DEPARTEMEN PPHI 2021-2025

No.	Sasaran Strategis	Kerangka Pendanaan
SS.1	Terwujudnya DEPARTEMEN yang memiliki Program Studi yang Bersaing Secara Nasional dan Internasional berdasarkan Kampus Merdeka untuk mahasiswa dan alumni yang berdaya saing	26.75%
SS.2	Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi nasional dan internasional untuk pengembangan kajian PPHI yang bermanfaat bagi masyarakat melalui kerjasama internal dan eksternal dengan kerjasama	12.5%
SS.3	Terselanggaranya Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berbasis pada Hasil Penelitian dan Kajian Kelompok Keahlian yang bekerjasama dengan pihak eksternal dan internal	17%
SS.4	Terwujudnya kompetensi SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing, dengan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan efisien	43.75%

BAB IV
PENUTUP

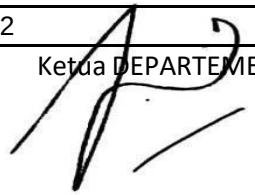
Renstra Jurusan PPHI FISIP Universitas Brawijaya sebagaimana dijabarkan pada bab 3 dokumen ini, telah menunjukkan alur yang sistematis dan konsisten dengan apa yang digariskan dalam visi-misi Jurusan PPHI. Renstra Jurusan PPHI yang disusun untuk tahun 2021 – 2025 ini ditetapkan dalam rangka mencapai standar keilmuwan Jurusan PPHI yang bereputasi internasional, sesuai visi hingga 2025 nanti.

Meskipun demikian, sebagai Jurusan yang masih relatif baru usianya, Jurusan PPHI menetapkan tahapan capaian dalam mencapai visi misi di level internasional tersebut secara bertahap. Tahapan itu tercantum dalam dokumen visi tiga program studi yang menjadi bagian dalam Jurusan PPHI.

Pada akhirnya, keberhasilan perencanaan (Renstra) ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, tidak hanya pimpinan Jurusan PPHI, melainkan juga seluruh komponen Program Studi, yakni dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.

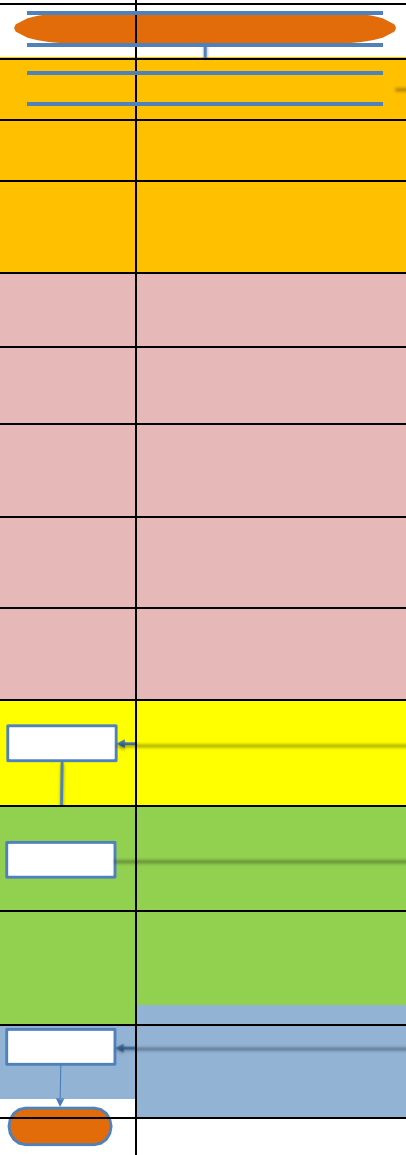
Lampiran :

1. SOP Penyusunan Renstra DEPARTEMEN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA**	**NOMOR SOP**	UN10/F11/13/HK.01.02.a/02
	TGL PEMBUATAN	14 Juli 2018
	TGL REVISI	25 November 2021
	TGL EFEKTIF	2 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	Ketua DEPARTEMEN PPHI  Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt NIP. 197802202010121001
	NAMA SOP	PENYUSUNAN RENSTRA DEPARTEMEN

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1 Renstra Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2 Renstra Program Studi 3 Manual Mutu DEPARTEMEN	1 Memahami renstra FISIP UB 2 Memahami dokumen evaluasi diri di masing-masing Program Studi 3 Memahami visi, misi, dan tujuan DEPARTEMEN serta penurunannya ke Renstra
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1 SOP Penyusunan Program Kerja DEPARTEMEN 2 Dokumen Evaluasi Diri	1 Ruangan yang memadai 2 Komputer/printer/scanner 3 Jaringan internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Penyusunan Renstra DEPARTEMEN harus mempertimbangkan RenstraUniversitas, Renstra Fakultas dan Program Studi	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	Sklus PPEPP
		Kajur	Sekretaris DEPARTEMEN	Ketua Program Studi	Panitia Penyusunan Renstra DEPARTEMEN PPHI	Stakeholder DEPARTEMEN	UJM PPHI	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mulai											
2	Rapat Pimpinan DEPARTEMEN PPHI dan membentukpanitia penyusunan renstra							komputer, jaringan internet	1 minggu	Surat Tugas		Penetapan
3	Mempersiapkan waktu dan tempat rapat renstra							komputer, jaringan internet	1 minggu	Akomodasi		Penetapan
4	Mengundang stakeholders DEPARTEMEN yang terdiridari ketua Program Studi dan Tim UJM, dan Koordinator DEPARTEMEN							renstra fakultas	3 hari	Surat Undangan		Penetapan
5	Menyusun visi, misi, dan tujuan DEPARTEMEN PPHI							komputer, jaringan internet	1 Minggu	Dokumen evaluasi diri		Pelaksanaan
6	Perumusan Strategi Pencapaian Tujuan							komputer, jaringan internet	3 hari			Pelaksanaan
7	Perumusan Indikator Pencapaian Tujuan							komputer, jaringan internet, meja persidangan, ruang sidang, proyektor	2 Jam			Pelaksanaan
8	Pembuatan Dokumen Rencana Strategis PPHI							komputer, jaringan internet, meja persidangan, ruang sidang, proyektor	3 hari	Draf renstra DEPARTEMEN		Pelaksanaan
9	Sosialisasi Rencana Strategis PPHI ke semua dosen dan stakeholders							komputer, jaringan internet, meja persidangan, ruang sidang, proyektor	3 hari	Draf renstra DEPARTEMEN		Pelaksanaan
10	Kajur melakukan evaluasi terhadap Renstra DEPARTEMEN yang telah disosialisasikan								5 hari	Laporan kegiatan		Evaluasi
11	Pengesahan dokumen renstra yang baru								1 hari			Pengendalian
12	UJM melaksanakan dokumentasi dan pengendalian dokumen								1 hari	Renstra DEPARTEMEN PPHIyang telah disahkan		Pengendalian
13	Kajur melakukan peningkatan standarisasi Renstra di periode berikutnya								1 hari			Peningkatan
14	Selesai											



2. Alumni memberi masukan untuk penyusunan Visi Misi Departemen PPHI







Pemberian masukan alumni terhadap Renstra Departemen PPHI dengan peserta :

1. Firdaus Ali Firmansyah, S.IP dari Indonesia Indikator Jakarta
2. M. Lutfil Hakim, S.IP dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Jakarta
3. Rijal Abdullah, S.IP, dari Fraksi PAN DPRD Tulungagung
4. Gita Permatasari, S.IP, dari Yayasan Satunama Yogyakarta
5. Mutiara Indah Permatasari, S.IP, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
6. Vincentia Retno Puspita Wardhani, S.IP, Bank Mandiri Sidoarjo